

**NAMA : Reyon Febrio**

**NPM : 2316041093**

**KELAS : Organisasi Internasional & Globalisasi MBKM 2026**

**TEMA 2 "Siapa saja stakeholder yang terlibat dengan organisasi MBKM anda?"**

---

## **Analisis Stakeholder dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan Negara oleh Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI**

### **I. PENDAHULUAN**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam sistem demokrasi modern, pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Literatur terkini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keuangan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara lembaga audit, lembaga legislatif, pemerintah, dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan publik (Cordery & Hay, 2025; Makanga et al., 2025).

Di Indonesia, salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi strategis dalam pengawasan keuangan negara adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN berperan dalam menelaah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta memberikan masukan kepada komisi terkait dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara. Posisi tersebut menempatkan BAKN sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda (Azam & Bouckaert, 2025).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pengawasan keuangan negara tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila hanya bergantung pada satu institusi. Mukhamedyarova et al. (2025) menemukan bahwa keberhasilan tata kelola anggaran sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara lembaga audit, lembaga pengawasan, dan entitas yang diawasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Makanga et al. (2025) yang menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas publik akan berjalan lebih efektif ketika terdapat keterhubungan yang kuat antara

lembaga pengawas, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan stakeholder menjadi faktor penting dalam mendukung fungsi pengawasan keuangan negara.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara BAKN dan BPK menjadi salah satu elemen utama dalam proses akuntabilitas keuangan negara. Penelitian Annisa dan Sampurna (2024) menunjukkan bahwa lembaga audit negara memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi dan temuan pemeriksaan yang menjadi dasar bagi proses pengawasan dan evaluasi kebijakan publik. Hasil pemeriksaan yang dihasilkan BPK tidak hanya digunakan oleh DPR RI, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan yang berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain lembaga audit, pemerintah pusat dan kementerian/lembaga juga merupakan stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dengan BAKN. Sebagai pihak yang mengelola dan menggunakan anggaran negara, instansi pemerintah menjadi objek pengawasan sekaligus mitra dalam proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Kajian mengenai reformasi sektor publik di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga pengawas dan instansi pemerintah merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Azam & Bouckaert, 2025; Firmansyah & Azhar, 2025).

Di sisi lain, perkembangan tata kelola pemerintahan modern menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima layanan publik, tetapi juga sebagai stakeholder yang memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan keuangan negara. Penelitian Harahap dan Kwek (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik dan keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemerintahan. Oleh karena itu, masyarakat dan media massa dapat dipandang sebagai stakeholder eksternal yang berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas lembaga negara.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan fungsi BAKN tidak berdiri sendiri, melainkan berlangsung dalam suatu jaringan hubungan yang melibatkan DPR RI, BPK, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga negara, masyarakat, media massa, serta berbagai aktor pendukung lainnya. Namun demikian, masih terbatas kajian yang secara khusus mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terkait dengan BAKN dalam perspektif teori stakeholder. Oleh karena itu, paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan BAKN DPR RI serta menjelaskan peran dan kepentingan masing-masing stakeholder dalam mendukung pelaksanaan fungsi akuntabilitas keuangan negara.

## II. LANDASAN TEORI

### Teori Stakeholder

Teori stakeholder pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Freeman (1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada kepentingan pemilik organisasi, teori stakeholder menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan organisasi. Dalam konteks sektor publik, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari pencapaian target kelembagaan, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi harapan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap layanan dan kebijakan publik.

Menurut Freeman (1984), organisasi harus mampu mengidentifikasi stakeholder yang memiliki kepentingan, pengaruh, maupun dampak terhadap aktivitas organisasi. Hubungan yang baik antara organisasi dan stakeholder akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat legitimasi kelembagaan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan.

Pengembangan teori stakeholder selanjutnya dilakukan oleh Mitchell, Agle, dan Wood (1997) melalui konsep *stakeholder salience*. Mereka menjelaskan bahwa tingkat kepentingan suatu stakeholder dapat dianalisis berdasarkan tiga atribut utama, yaitu kekuasaan (power), legitimasi (legitimacy), dan urgensi (urgency). Stakeholder yang memiliki ketiga atribut tersebut cenderung memperoleh perhatian yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, pendekatan stakeholder menjadi semakin relevan karena lembaga pemerintah beroperasi dalam lingkungan yang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang beragam. Bryson (2004) menyatakan bahwa identifikasi stakeholder merupakan langkah penting dalam manajemen publik karena dapat membantu organisasi memahami pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan teori stakeholder, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dapat dipahami sebagai organisasi yang berinteraksi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Hubungan tersebut muncul karena pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara

membutuhkan dukungan informasi, koordinasi, serta partisipasi dari berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

### **Konsep Stakeholder dalam Organisasi Sektor Publik**

Dalam sektor publik, stakeholder memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan organisasi bisnis. Jika perusahaan umumnya berorientasi pada keuntungan ekonomi, organisasi publik berorientasi pada penciptaan nilai publik (*public value*) melalui penyelenggaraan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Cordery dan Hay (2025) menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas sektor publik modern melibatkan interaksi antara lembaga legislatif, lembaga audit, pemerintah, dan masyarakat. Setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif tata kelola publik, stakeholder dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi organisasi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan aktivitas organisasi. Sementara itu, stakeholder sekunder merupakan pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional organisasi tetapi dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan organisasi.

Pada lembaga pengawasan keuangan negara, stakeholder primer umumnya meliputi lembaga legislatif, lembaga audit, pemerintah sebagai entitas yang diawasi, serta unit organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan. Adapun stakeholder sekunder dapat mencakup masyarakat, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan yang memiliki perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas publik.

### **Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang memiliki fungsi mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keberadaan BAKN menjadi bagian penting dalam sistem checks and balances yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tata tertib DPR RI, BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelaahan tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi komisi-

komisi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kementerian, lembaga negara, maupun institusi lain yang mengelola keuangan negara.

Posisi BAKN dalam sistem akuntabilitas publik menunjukkan bahwa lembaga ini tidak bekerja secara independen tanpa keterlibatan pihak lain. Pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan data dari BPK, koordinasi dengan alat kelengkapan DPR RI, komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah, serta perhatian dari masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, BAKN dapat dipandang sebagai bagian dari jaringan stakeholder yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel.

### **Kerangka Pemikiran**

Teori stakeholder menjelaskan bahwa organisasi harus mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki pengaruh maupun kepentingan terhadap pelaksanaan fungsi organisasi. Dalam konteks BAKN DPR RI, fungsi pengawasan keuangan negara dilaksanakan melalui hubungan dengan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda dalam sistem akuntabilitas publik.

BPK berperan sebagai penyedia hasil pemeriksaan yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR RI berperan sebagai institusi yang menaungi BAKN sekaligus pengguna hasil penelaahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Pemerintah pusat dan kementerian/lembaga merupakan pihak yang menjadi objek pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sementara itu, masyarakat dan media massa berperan sebagai pihak yang memperoleh manfaat dari meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hubungan tersebut, tulisan ini menggunakan teori stakeholder sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan menganalisis stakeholder yang terkait dengan BAKN DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Posisi BAKN dalam Jaringan Stakeholder Pengawasan Keuangan Negara**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berbeda dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara, BAKN berfungsi melakukan penelaahan terhadap hasil pemeriksaan BPK untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Posisi tersebut menunjukkan bahwa BAKN tidak bekerja sebagai lembaga yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas keuangan negara yang melibatkan berbagai pihak dengan peran yang saling berkaitan.

Dalam perspektif teori stakeholder, keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya membangun hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan fungsi organisasi tersebut (Freeman, 1984). Konsep ini relevan untuk menjelaskan posisi BAKN karena pelaksanaan tugas penelaahan hasil pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara independen tanpa dukungan informasi, koordinasi, dan tindak lanjut dari berbagai stakeholder. Dengan kata lain, kualitas pelaksanaan fungsi BAKN tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal lembaga, tetapi juga oleh efektivitas interaksi yang dibangun dengan stakeholder yang terkait.

Hubungan tersebut terlihat sejak awal proses pengawasan berlangsung. BAKN membutuhkan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan BPK sebagai bahan utama penelaahan. Hasil penelaahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Pada saat yang sama, kementerian dan lembaga negara menjadi pihak yang berkepentingan terhadap hasil pengawasan karena rekomendasi yang dihasilkan dapat memengaruhi tata kelola organisasi dan pengelolaan anggaran yang mereka jalankan. Pada akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Keterhubungan tersebut menunjukkan bahwa BAKN berada pada posisi sentral dalam rantai akuntabilitas keuangan negara. BAKN tidak menghasilkan audit, tidak pula melaksanakan program pemerintah, tetapi berperan sebagai penghubung antara informasi hasil audit dan

fungsi pengawasan parlemen. Oleh karena itu, identifikasi stakeholder menjadi penting untuk memahami pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tugas BAKN sekaligus pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari keberadaan lembaga tersebut.

### **Stakeholder Utama dalam Pelaksanaan Fungsi BAKN**

Berdasarkan tingkat keterkaitan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas BAKN, stakeholder yang terkait dapat dibedakan menjadi stakeholder utama dan stakeholder pendukung. Stakeholder utama merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan proses penelaahan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara. Keberadaan stakeholder ini menentukan efektivitas pelaksanaan tugas BAKN secara keseluruhan.

#### **a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

BPK merupakan stakeholder utama sekaligus stakeholder yang paling strategis bagi BAKN. Hubungan ini muncul karena seluruh aktivitas penelaahan yang dilakukan BAKN bersumber dari laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK. Dengan demikian, terdapat hubungan ketergantungan yang kuat antara kedua lembaga tersebut.

Dalam sistem akuntabilitas publik, lembaga audit berfungsi menyediakan informasi yang independen mengenai pengelolaan keuangan negara. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi lembaga pengawasan untuk melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan (Cordery & Hay, 2025). Dalam konteks Indonesia, fungsi tersebut tercermin dalam hubungan antara BPK dan BAKN. Semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan BPK, semakin kuat pula dasar analisis yang dapat digunakan BAKN dalam menjalankan tugasnya.

Posisi BPK sebagai stakeholder utama juga terlihat dari perannya dalam membangun kredibilitas proses pengawasan. Temuan audit yang dihasilkan BPK memberikan legitimasi terhadap berbagai isu yang kemudian ditelaah dan ditindaklanjuti dalam mekanisme pengawasan DPR RI. Oleh karena itu, BPK tidak hanya berfungsi sebagai penyedia data, tetapi juga sebagai fondasi utama yang menentukan kualitas pengawasan keuangan negara.

## **b. Komisi-Komisi DPR RI**

Selain BPK, stakeholder utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan BAKN adalah komisi-komisi DPR RI. Hasil penelaahan yang dilakukan BAKN pada dasarnya disusun untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI melalui komisi yang membidangi sektor tertentu.

Hubungan antara BAKN dan komisi DPR menunjukkan adanya hubungan fungsional yang saling melengkapi. BAKN menghasilkan analisis berbasis hasil pemeriksaan BPK, sedangkan komisi menggunakan analisis tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga mitra kerja. Dengan demikian, hasil kerja BAKN memperoleh nilai strategis ketika digunakan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh komisi DPR RI.

Keberadaan komisi sebagai stakeholder utama menunjukkan bahwa fungsi BAKN tidak berhenti pada kegiatan penelaahan semata. Hasil penelaahan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI agar dapat menghasilkan rekomendasi yang mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara. Oleh karena itu, efektivitas BAKN juga ditentukan oleh sejauh mana hasil analisis yang disusun mampu menjawab kebutuhan pengawasan komisi-komisi DPR RI.

### **Kementerian dan Lembaga Negara sebagai Stakeholder yang Diawasi**

Selain BPK dan komisi-komisi DPR RI, stakeholder yang memiliki keterkaitan erat dengan BAKN adalah kementerian dan lembaga negara. Hubungan ini muncul karena sebagian besar temuan yang menjadi objek penelaahan BAKN berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran negara. Dengan kata lain, kementerian dan lembaga negara merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh hasil penelaahan yang dilakukan BAKN.

Dalam sistem akuntabilitas keuangan negara, pengawasan tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan atau penyimpangan, melainkan juga mendorong perbaikan tata kelola organisasi. Oleh karena itu, posisi kementerian dan lembaga negara tidak dapat dipandang hanya sebagai objek pengawasan. Mereka juga merupakan stakeholder yang berkepentingan terhadap kualitas hasil penelaahan karena rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.

Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara BAKN dan kementerian atau lembaga negara bersifat timbal balik. Di satu sisi, BAKN membutuhkan informasi, klarifikasi, dan tindak lanjut dari kementerian atau lembaga terkait untuk memperkuat hasil penelaahan. Di sisi lain, kementerian dan lembaga membutuhkan masukan yang objektif sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara. Semakin baik kualitas komunikasi dan koordinasi yang terbangun, semakin besar pula peluang terciptanya perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Dalam perspektif teori stakeholder, kementerian dan lembaga negara termasuk stakeholder primer karena memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi BAKN. Pengaruh stakeholder ini cukup besar karena keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kualitas analisis yang dihasilkan, tetapi juga oleh sejauh mana rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, efektivitas fungsi BAKN pada akhirnya tidak hanya bergantung pada proses penelaahan, tetapi juga pada respons dan komitmen kementerian serta lembaga negara dalam melakukan perbaikan.

### **Masyarakat sebagai Stakeholder Akhir dalam Sistem Akuntabilitas Keuangan Negara**

Apabila BPK menyediakan informasi, komisi DPR memanfaatkan hasil penelaahan, dan kementerian atau lembaga menjadi pihak yang diawasi, maka masyarakat merupakan stakeholder yang menerima manfaat akhir dari seluruh proses pengawasan keuangan negara. Hal ini karena tujuan utama pengelolaan keuangan negara pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Posisi masyarakat sebagai stakeholder sering kali tidak terlihat secara langsung dalam proses penelaahan yang dilakukan BAKN. Namun, secara substansial masyarakat merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Setiap temuan yang berhasil diidentifikasi, setiap rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan setiap perbaikan tata kelola yang dilakukan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Dalam perkembangan tata kelola pemerintahan modern, masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Keterbukaan informasi, akses terhadap hasil pemeriksaan, serta meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa publik memiliki peran yang semakin penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas

pemerintahan. Temuan Harahap dan Kwek (2025) menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu faktor yang mampu memperkuat efektivitas sistem pengawasan sektor publik.

Selain masyarakat, media massa juga berperan dalam memperkuat fungsi pengawasan melalui penyebaran informasi kepada publik. Publikasi mengenai hasil pemeriksaan, temuan penyimpangan, maupun tindak lanjut rekomendasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Oleh karena itu, media dapat dipandang sebagai stakeholder pendukung yang membantu menjembatani informasi antara lembaga negara dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat menempati posisi yang unik dalam jaringan stakeholder BAKN. Meskipun tidak terlibat secara langsung dalam proses penelaahan hasil pemeriksaan, seluruh aktivitas yang dilakukan BAKN pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan fungsi BAKN tidak hanya diukur dari jumlah laporan yang ditelaah atau rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga dari kontribusinya dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **Analisis Tingkat Kepentingan dan Pengaruh Stakeholder terhadap BAKN DPR RI**

Setelah mengidentifikasi stakeholder yang terkait dengan BAKN DPR RI, langkah selanjutnya adalah menganalisis tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) masing-masing stakeholder terhadap pelaksanaan fungsi BAKN. Analisis ini penting karena tidak seluruh stakeholder memiliki kontribusi dan pengaruh yang sama dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara.

Menurut Mitchell, Agle, dan Wood (1997), tingkat pentingnya suatu stakeholder dapat dilihat dari kemampuan stakeholder tersebut dalam memengaruhi organisasi serta tingkat kepentingannya terhadap aktivitas organisasi. Dalam konteks BAKN, pengaruh menunjukkan kemampuan stakeholder untuk memengaruhi proses penelaahan dan tindak lanjut pengawasan, sedangkan kepentingan menunjukkan sejauh mana stakeholder memiliki keterkaitan terhadap hasil kerja BAKN.

Berdasarkan hasil analisis, stakeholder BAKN dapat dipetakan ke dalam empat kategori sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Pemetaan Stakeholder Berdasarkan Tingkat Pengaruh (Power) dan Kepentingan (Interest)



### a. Kelompok Manage Closely

Kelompok ini terdiri atas stakeholder yang memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang sama-sama tinggi terhadap BAKN, yaitu BPK RI dan Komisi-Komisi DPR RI.

BPK memiliki pengaruh yang tinggi karena seluruh aktivitas penelaahan BAKN bergantung pada laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK. Selain itu, BPK juga memiliki kepentingan yang tinggi karena hasil pemeriksaan yang dilakukannya perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan DPR RI agar dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara.

Sementara itu, komisi-komisi DPR RI memiliki pengaruh yang besar karena menjadi pengguna utama hasil penelaahan yang dihasilkan BAKN. Tanpa adanya pemanfaatan hasil penelaahan oleh komisi, kontribusi BAKN terhadap fungsi pengawasan DPR RI akan menjadi kurang optimal.

### b. Kelompok Keep Satisfied

Kelompok ini ditempati oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengelola keuangan negara. Pemerintah memiliki pengaruh yang besar karena menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti berbagai temuan dan rekomendasi yang muncul dari proses pengawasan.

Namun demikian, kepentingan pemerintah terhadap aktivitas internal BAKN tidak sebesar stakeholder utama lainnya karena pemerintah lebih berfokus pada pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, hubungan antara BAKN dan pemerintah perlu dikelola secara konstruktif agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.

#### **c. Kelompok Keep Informed**

Masyarakat dan akademisi berada dalam kelompok ini karena memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun pengaruh langsungnya terhadap proses kerja BAKN relatif terbatas.

Masyarakat berkepentingan terhadap efektivitas pengawasan karena hasilnya akan berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Di sisi lain, akademisi memiliki perhatian terhadap isu tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik yang dapat menjadi bahan penelitian maupun pengembangan kebijakan.

Meskipun pengaruh langsung kedua stakeholder ini tidak besar, keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik tetap diperlukan untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan fungsi BAKN.

#### **d. Kelompok Monitor**

Media massa ditempatkan pada kategori ini karena tidak memiliki keterlibatan langsung dalam proses penelaahan maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, media tetap memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi mengenai hasil pengawasan kepada masyarakat.

Melalui fungsi kontrol sosial yang dijalankan, media dapat membantu meningkatkan transparansi serta mendorong perhatian publik terhadap isu-isu pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, meskipun tingkat pengaruhnya terhadap proses internal BAKN relatif terbatas, keberadaan media tetap perlu diperhatikan sebagai bagian dari ekosistem akuntabilitas publik.

Berdasarkan pemetaan stakeholder tersebut, dapat disimpulkan bahwa **BPK RI dan Komisi-Komisi DPR RI merupakan stakeholder paling strategis bagi BAKN DPR RI**. Kedua stakeholder tersebut memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang tinggi sehingga

keberhasilan pelaksanaan fungsi BAKN sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan yang terbangun dengan keduanya.

Sementara itu, kementerian dan lembaga negara berperan sebagai stakeholder yang menentukan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, sedangkan masyarakat menjadi stakeholder utama dari sisi manfaat yang dihasilkan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi BAKN tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang saling mendukung antara berbagai stakeholder dalam sistem akuntabilitas keuangan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). *Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib DPR RI*. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Annisa, Izzah, and Agung Firman Sampurna. "ANALYSIS OF THE ROLE OF BPK RI IN PROMOTING ORGANIZATIONAL CAPACITY DEVELOPMENT OF ASEANSAI IN THE PERIOD 2018-2023." *Journal of Syntax Literate* 9, no. 6 (2024).
- Azam, M., & Bouckaert, G. (2025). The Narrative path of Indonesian public sector reforms 1998-2023. *Developments in Administration*, 6(1), 17-44.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public management review*, 6(1), 21-53.
- Cordery, C. J., & Hay, D. (2025). Public sector audit: new public management influences and eco-system driven reforms. *Journal of public budgeting, accounting & financial management*, 37(4), 595-618.
- Firmansyah, A., & Azhar, Z. (2025). Assessing The Readiness of Local Governments for Sustainability Reporting in Indonesia: A Policy and Institutional Analysis. *Journal of International Public Sector Accounting Review (IPSAR)*, 3(1), 2987-4114.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stokholder approach*. Boston, MA: Pitman.
- Harahap, I. H., & Kwek, S. (2025). The Role of Ombudsman as A'Watchdog'in Supporting Public Service Reform. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(3), 418-437.
- Makanga, C. N., Orobia, L. K., Kaawaase, T. K., Nabeta, I. N., Mindra, R. K., & Munene, J. C. (2025). Oversight mechanisms and public accountability in an emerging economy. *Cogent Business & Management*, 12(1), 2507216.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- Mukhamedyarova, L., Tussibayeva, G., Shakharova, A., Rudžionienė, K., Christauskas, Č., & Rakayeva, A. (2025). The Influence of Public Audit Bodies on the Effectiveness of Local Budget Governance. *Administrative Sciences*, 15(12), 493.

